

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Fahrudin menyatakan kesejahteraan berasal dari kata “Sejahtera” yang berasal dari Bahasa Sanskerta “Catera” yang berarti Payung yang berarti terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran, dan lainnya. Sedangkan Sosial berasal dari kata “Socius” yang bermakna kawan, teman, maupun kerja sama dengan melakukan interaksi dengan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terbebas dari segala kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sehingga dapat berinteraksi dengan orang lain maupun lingkungan dengan baik. Kesejahteraan sosial dalam (Fahrudin, 2018) yang dikutip dari Friedlander (1980) yaitu:

Social welfare includes those provisions and processes directly concerned with the treatment and prevention of social problems, the development of human resources, and the improvement in the quality of life. It involves social services to individuals and families as well as efforts to strengthen or modify social institutions. (Fahrudin, 2018a)

Kesejahteraan sosial adalah sistem terorganisasi dari pelayanan pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu sistem pelayanan sosial yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan

kelompok. Seseorang dikatakan sejahtera apabila dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari.

Namun, menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial yaitu “kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat”. Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pencegahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Undang-Undang yang memuat prinsip-prinsip kesejahteraan sosial, maka kesejahteraan sosial sebagai suatu “sistem organisasi” yang diwujudkan dalam bentuk sistem organisasi pelayanan manusia seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), panti-panti sosial, dan lain-lain. Serta ada juga yang menafsirkan kesejahteraan sosial bagi suatu “gerakan/aktivitas”, pengertian ini tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu gerakan atau aktivitas manusia dapat meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan) agar dapat bersaing dan bertahan hidup dalam masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah sebuah tatanan kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup individu. Kesejahteraan sosial juga dilandasi dengan beberapa aspek seperti yang dituturkan oleh Maslow tentang tingkat kebutuhan dasar manusia.

1. Kebutuhan fisiologis
2. Kebutuhan rasa aman
3. Kebutuhan akan penghargaan atau pengakuan
4. Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang
5. Aktualisasi diri

Teori Hierarki ini dicetuskan oleh Abraham Maslow dan juga sering disebut dengan Teori Maslow. Teori ini sangat berpengaruh bagi keberlangsungan kesejahteraan manusia, dimana manusia membutuhkan 5 tingkatan itu untuk kebutuhan hidupnya. Definisi mengenai kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, baik kita suka atau tidak, hampir semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita berkaitan dengan orang lain (Jones, 2009). Kondisi sejahtera (well-being) biasanya menunjukkan pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Sedangkan kesejahteraan sosial menurut Friedlander kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari usaha dan lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat demi tercapainya standar kehidupan

yang layak, serta tercapainya hubungan perseorangan dan sosial yang dapat membuat mereka mengembangkan kemampuannya dengan maksimal (Fahrudin 2014:9).

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dibahas pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan sosial bertujuan:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Tujuan kesejahteraan sosial untuk tercapainya keberfungsian sosial serta dapat mengurangi sebuah guncangan sosial seperti ketimpangan sosial, sehingga masyarakat sebagai individu maupun kelompok dapat mencapai kesejahteraan

dalam hidupnya. Terdapat beberapa tujuan dari kesejahteraan sosial menurut Schneiderman (Fahrudin 2014).

1. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik, terutama dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan mengeksplorasi sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan
2. Untuk mencapau kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya taraf hidup yang layak seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan hubungan sosial yang harmonis dengan lingkungan.

2.1.3 Usaha Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud dengan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang merupakan bagian internal dari pembangunan nasional bertujuan mencapai keadaan sistem kesejahteraan sosial yang mapan dan melembaga menuju masyarakat Indonesia yang maju,

mandiri, cerdas, dan sejahtera, lahir batin. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat itu, maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial juga diselenggarakan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah

Program pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan nasional juga berusaha menempatkan manusia sebagai titik sentral usaha pembangunan dalam menciptakan kualitas manusia dan masyarakat yang maju dan mandiri, sehingga akan meningkatkan peran serta produktivitas masyarakat. Upaya untuk menciptakan keadaan tersebut bukan merupakan tugas pemerintah saja, namun peran serta masyarakat melalui organisasi sosial (ORSOS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat diperlukan. Organisasi Sosial atau Organisasi Kesejahteraan Sosial menurut Soermadhi.

Suatu bentuk perkumpulan dua orang atau lebih yang saling mengadakan interaksi dalam proses kerja sama yang terikat secara formal dalam suatu susunan hirarkis baik vertical maupun horizontal untuk melaksanakan usaha bidang kesejahteraan sosial (usaha kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (1987:31).

Organisasi kesejahteraan sosial dimaksud dalam menjalankan kegiatan operasionalnya biasanya dalam bentuk yayasan sosial, yaitu suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota (UU Nomor 16 Tahun 2011). Organisasi sosial yang bergerak diberbagai jenis bidang layanan kesejahteraan sosial antara lain seperti program untuk meningkatkan kemampuan dan sumber daya manusia, program anak asuh, rehabilitasi penyandang cacat, dan lain sebagainya.

2.1.4 Komponen-Komponen Kesejahteraan Sosial

Semua kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial mempunyai ciri-ciri, tujuan dan fungsi tertentu yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan lain. Kesejahteraan sosial juga memiliki komponen tersebut pada akhirnya akan membuat aktivitas kesejahteraan sosial berbeda dengan aktivitas lainnya. Disebutkan oleh Fahrudin(2014). Beberapa komponen yang di maksud adalah:

a. Organisasi Formal

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/ badan sosial yang formal pula. Kegiatan yang dilaksanakan memperoleh pengakuan masyarakat karena memberikan pelayanan secara teratur, dan pelayanan yang diberikan merupakan fungsi utamanya.

b. Pendanaan

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Mobilisasi dan sumber merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan kesejahteraan sosial karenanya tidak mengejar keuntungan semata-mata.

c. Tuntutan Kebutuhan Manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.

d. Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis, dan menggunakan metoda dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

e. Kebijakan/Perangkat Hukum/ Perundang-undangan

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses, pelayanan, dan pengakhiran pelayanan.

f. Peran Serta Masyarakat

Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat.

g. Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

2.1.5 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki fungsi yang dimana dapat memperbaiki secara progressif dari kondisi hidup seseorang melalui pengembangan sumber daya manusia dengan penggunaan, pencipta sumber komunitas, pengediaan struktur institusional untuk berfungsinya pelayanan yang terorganisir dan pembangunan

berorientasi terhadap perubahan. Adapun fungsi kesejahteraan sosial menurut Fredlander dan Apte (Fahrudin 2012:12).

a. Fungsi Pencegahan (Preventif)

Kesejahteraan sosial bertujuan untuk memandirikan individu, keluarga, dan masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah sosial yang baru.

b. Fungsi Penyembuhan (Kuratif)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk mengatasi kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial sehingga orang yang mengalami masalah tersebut mengembalikan keberfungsian sosialnya secara wajar dalam masyarakat.

c. Fungsi Pembangunan

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi Pendukung (Suportif)

Fungsi ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk membantu tercapainya tujuan sector atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Fungsi kesejahteraan sosial ini dapat diterapkan dalam praktik pekerja sosial professional dan dalam penyelesaian masalah penyandang disabilitas yang belum bisa mandiri, upaya pemenuhan kemandirian penyandang disabilitas, lembaga-lembaga terkait perlu dilibatkan dalam penyelesaian masalah tersebut.

2.2 Tinjauan Masalah Sosial

2.2.1 Definisi Masalah Sosial

Masalah sosial adalah sebuah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, hal ini biasa terjadi di masyarakat bahkan bisa menyebabkan sebuah kerugian seperti pertikaian antar individu, kelompok dan masyarakat. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Soerjono Soekanto, masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok. Adapun masalah sosial menurut para ahli:

- a. Menurut Rubington dan Weiberg (1989) “Masalah sosial adalah suatu kondisi yang dinyatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang di anut oleh sebaian warga, yang sepakat bahwa suatu kegiatan bersama diperlukan untuk mengubah kondisi itu”.
- b. Menurut Gillin and Gillin (1945:323) “Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat kehidupan kelompok sosial. Atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial.
- c. Mengenai masalah sosial Robert A. Nisbet (1961:12) mengemukakan bahwa:

Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan, dengan hukum dan bersifat merusak. Oleh sebab itu, masalah-masalah sosial tak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

d. Tangdilintin dan Presetyo (2014) mengemukakan mengenai masalah sosial “Masalah sosial adalah suatu kondisi yang dinyatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian warga, yang sepakat bahwa suatu kegiatan bersama diperlukan untuk mengubah kondisi itu”.

2.2.2 Faktor Penyebab Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan suatu gejala atau suatu fenomena yang ada di masyarakat dan merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan oleh sebagian besar masyarakat. Berikut definisi masalah sosial menurut Weinberg (1989).

Masalah sosial merupakan situasi yang dinyatakan sebagai suatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, dimana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. dari definisi tersebut memiliki unsur-unsur penting yaitu suatu situasi yang dinyatakan, warga masyarakat yang signifikan, dan kebutuhan akan tindakan pemecahan masalah (Soetomo 2015)

Berdasarkan definisi masalah sosial menurut Weinberg, dapat disimpulkan bahwa masalah sosial adalah situasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku, masyarakat membutuhkan suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut dan dapat menjalankan keberfungsian.

Masalah sosial jika dibiarkan tanpa ada jalan keluar akan berdampak pada kehidupan masyarakat seperti menyebabkan permasalahan yang berkepanjangan, hal ini akan menjadi ancaman untuk masyarakat itu sendiri sebab akan menurunnya efektifitas keberfungsian dan kesejahteraan pada individu, kelompok dan masyarakat itu sendiri. Adapun faktor penyebab masalah sosial yaitu:

1. Masalah Ekonomi

a. Kemiskinan

Menurut John Friendman mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar (esensial) individu sebagai manusia. Dapat diartikan pula sebagai kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapat tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) menjadi masalah di banyak negara berkembang termasuk Indonesia.

Secara teoritis penyebab kemiskinan terbagi menjadi dua yaitu kemiskinan natural dan structural. Kemiskinan natural/alamiah timbul sebagai akibat terbatasnya jumlah sumber daya atau karena tingkat perkembangan untuk penguasaan teknologi yang sangat rendah. Sedangkan, kemiskinan struktural sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak dapat menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu kemiskinan absolut, terjadi ketika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan kultural yaitu berkaitan dengan pola pikir seseorang atau kelompok orang yang tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, dan kemiskinan relatif adalah seseorang yang hidup di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat.

b. Pengangguran

Pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan, terjadinya bonus demografi, dan migrasi yang dilakukan ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan tanpa keahlian yang mumpuni.

2. Budaya

Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksuaian pelaksanaan norma dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat akibat proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multicultural. Faktor budaya termasuk masalah sosial yang mencakup kenakalan remaja, pergaulan bebas, dan tawuran.

3. Biologis

Masalah sosial karena faktor biologis ini dapat muncul akibat adanya ketidaksuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat, seperti adanya wabah penyakit, virus penyakit baru, dan makanan beracun. Selain itu, ada juga permasalahan penyakit menular dan kurang gizi. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak dan dapat juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi.

4. Psikologis

Faktor psikologis ini juga berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada. Selain itu, masalah sosial yang satu ini tidak menanganinya karena butuh penanganan secara kesinambungan melalui pendekatan-pendekatan yang bijak. Hal ini akan mengganggu keberfungsian masyarakat sehingga jika dibiarkan akan menjadi masalah yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

2.2.3 Karakteristik Masalah Sosial

Masalah sosial muncul karena adanya kekurangan dalam diri manusia yang bersumber dari faktor ekonomi, biologis, biopsikologis serta kebudayaan. Faktor ekonomi yang salah satunya adalah kemiskinan. Masalah sosial memiliki 4 karakteristik Menurut (Huraerah, 2011).

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang. Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapat perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial.
2. Kondisi dinilai tidak menyenangkan. Menurut paham hedonism, orang yang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial.

Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya.

3. Kondisi yang menuntut pemecahan. Suatu yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan. Bila seseorang merasa lapar akan segera mencari rumah makan. Bila sakit kepala, ia akan segera pergi ke dokter atau membeli obat. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan. Pada waktu lalu, masalah kemiskinan tidak dikategorikan sebagai masalah sosial, karena masyarakat menanggapi kemiskinan sebagai suatu yang alamiah dan masyarakat belum memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Sekarang, setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menanggulangi kemiskinan, kemiskinan ramai diperbincangkan dan diseminarkan, karena dianggap sebagai masalah sosial.
4. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif, masalah sosial berbeda dengan masalah individu. Masalah individual dapat diatasi secara individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersigat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

2.2.4 Dampak Masalah Sosial

Dampak masalah sosial bagi masyarakat adalah meningkatnya kemiskinan, kejahatan atau kriminalitas, diorganisasi keluarga, masalah generasi muda, angka

kesenjangan sosial, penganggutan, dan membuka peluang terciptanya perang antara dua pihak.

1. Kemiskinan

Kemiskinan dapat melemahkan ikatan sosial. Kemiskinan yang berkepanjangan bisa menyerupai epidemi, kemiskinan telah menjadi fenomena yang semakin terstratifikasi dalam masyarakat, sehingga menimbulkan persaingan dan kesenjangan antar kelas sosial. Hal ini menyebabkan kurangnya saling pengertian antara individu dalam kelompok ekonomi dengan kelompok nawahan atau atasannya. Kemiskinan memiliki kekuatan untuk mendorong masyarakat untuk bersatu agar tidak menyakiti perasaan orang lain dan menjadi korban media sosial bukan milik mereka. Secara umum, mereka cenderung membangun permukiman datar dan tidak agresif di pinggiran kota karena kondisi kemiskinan yang menguntungkan dan hal ini menciptakan ketidakseimbangan lingkungan.

2. Kejahatan atau kriminalitas

Konflik sosial yang tidak terselesaikan antara pemerintah dan warga negara dapat menyebabkan masalah kesehatan dan aktivitas kriminal. Hal ini tidak hanya menimbulkan rasa cemas, namun juga dapat mengurangi perasaan tenang dan gembira. Berbagai faktor dapat menyebabkan masalah kesehatan, termasuk perubahan kondisi sosial atau ekonomi, masalah utang, tekanan keuangan, kepemimpinan yang lemah dan korupsi, masalah kesehatan mental, dan hubungan yang tidak stabil. Setiap orang dapat belajar tentang kesehatan melalui semua media, termasuk interaksi dengan orang disekitarnya. Permasalahan sosial yang

menimbulkan gangguan kesehatan juga dapat menimbulkan gangguan lainnya. Organisasi kriminal yang berkembang pesat dapat mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan nyata.

3. Disorganisasi keluarga

Permasalahan sosial dapat menyebabkan terpuruknya keluarga sebagai unit marginal masyarakat. Permasalahan ini terjadi karena keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dalam bidang psikologi sosial, organisasi diartikan sebagai suatu kelompok yang tidak terlalu besar, karena tidak ada perkawinan, perceraian, krisis internal, krisis keluarga, atau kekurangan dalam kelompok tersebut. Disorganisasi dalam kelompok diketahui disebabkan oleh kurangnya kemampuan atau kemauan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Salah satu akar penyebab perpecahan keluarga adalah ketidakmampuan mengelola masa transisi.

4. Masalah generasi muda

Pada faktor ini, dampak permasalahan sosial dilawan dengan dua hal mendasar yaitu sikap apatis dan penolakan. Karena tingkah lakunya yang menyimpang, kehancuran biasanya dibarengi dengan rasa takut terhadap keluarga, masyarakat dan Tuhan. Di sisi lain, sikap apatis seringkali menunjukkan perasaan apatis yang mulai menjalar ke seluruh masyarakat. Norma-norma baru yang diadaptasi dari perkembangan zaman semakin terhimpit di kalangan generasi muda. Dengan populasi yang berada dalam masa transisi, jumlah generasi muda semakin sedikit. Antara keinginan untuk mengekspresikan diri dan keterbatasan yang

diberikan. Di sisi lain, generasi muda seringkali merasakan keinginan untuk menunjukkan kehebatannya tanpa meremehkan orang lain, termasuk dirinya sendiri.

5. Perang

Perselisihan yang tidak terselesaikan dapat menimbulkan konflik dan pertikaian antara kedua belah pihak. Permasalahan yang tercantum disini dapat diselesaikan dengan mudah. Selain kerugian, trauma, kerusakan fasilitas umum, balas dendam, dan terganggunya hubungan sosial, perang juga mempunyai dampak jangka panjang. Bukan hanya itu, sebab akibat bahaya tersebut besar kemungkinan akan timbul beberapa permukiman kumuh, persediaan makanan berkurang, dan tingkat pendidikan menurun.

6. Kesenjangan sosial

Kehancuran masyarakat terjadi akibat kemiskinan akibat hilangnya kaum kapitalis dan anggota KKN. Ketidakseimbangan ekonomi dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial yang berujung pada kejahatan.

7. Pengangguran

Pengangguran dapat terjadi karena kurangnya sumber daya manusia (SDM), hasil pembelajaran yang buruk, keterpurukan ekonomi, dan kemajuan pekerjaan yang tidak merata.

2.2.5 Solusi Masalah Sosial

Masalah sosial yang sering kita temui di lingkungan atau dalam kehidupan sehari-hari. Adapun solusi dari masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri kecil di pedesaan

Langkah ini dapat mencegah kemiskinan rakyat desa, pemerataan pembangunan, dan mencegah terjadinya arus urbanisasi (perpindahan dari desa ke kota). Pengembangan industri merupakan satu langkah yang utuh mulai dari sosialisasi, penanaman motivasi dan mindset, seleksi, pembunaan, bantuan modal, bantuan pemasaran, dan manajemen usaha. Dengan adanya langkah yang komperhensif, dapat dibayangkan jika banyak industri yang beroperasi di pedesaan. Masyarakat desa memiliki penghasilan yang bervariasi dan hal ini akan mengurangi permasalahan sosial yang ada.

2. Meningkatkan Mobilitas Tenaga Kerja dan Stabilitas Modal

Tenaga kerja sebelumnya yang ada diberikan pelatihan yang lebih intensif dan kemudian dipindahkan ke daerah yang memiliki kesempatan kerja lebih besar. Hal ini memastikan daya saing mereka dengan pekerja lainnya. Pada saat yang sama, tujuan stabilitas modal adalah untuk memindahkan industri dari tempat dimana terdapat terlalu banyak lapangan kerja ke tempat dimana terdapat lebih banyak pengangguran. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesetaraan kesempatan kerja.

3. Menanamkan nilai-nilai moral dan agama

Dengan memberikan ajaran agama dan nilai-nilai moral di masyarakat, maka dapat mengurangi risiko terjadinya permasalahan sosial. Selain itu, nilai moral dan agama dapat menguatkan keimanan seseorang, agar tidak menyimpang dari hal kebaikan.

4. Memberikan bantuan asuransi kesehatan

Kesehatan masyarakat memang perlu mendapat perhatian karena sangat penting bagi pembangunan negara. Apalagi seluruh masyarakat menunjukkan bahwa negara ini jauh dari permasalahan sosial.

5. Memberikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) kepada siswa

Bantuan BOS ini dapat memberikan keringanan bagi siswa yang tidak dapat bersekolah. Semakin banyak siswa yang bersekolah maka semakin baik kualitas pendidikannya. Pendidikan sangat perlu mendapat perhatian khusus di pedesaan, karena jika tidak diperhatikan dapat menimbulkan permasalahan sosial.

6. Memberikan program beasiswa

Tidak sedikit orang yang memang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, namun tidak memiliki biaya sehingga tidak bisa mendapatkan ilmu yang diimpikannya. Oleh karena itu, dengan menawarkan program beasiswa kepada yang memiliki keahlian khusus, maka akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

7. Memberikan bantuan langsung tunai (BLT)

Masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan merupakan pertanda adanya masalah sosial. Itu sebabnya pemberian BLT terasa bermanfaat bagi masyarakat yang kesulitan secara ekonomi akan merasa sedikit terbantu.

2.3 Tinjauan Pelayanan Sosial

2.3.1 Definisi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial adalah pelayanan yang diberikan oleh suatu pihak yang terkait dengan tujuan memecahkan masalah, keberfungsian, dan perpecahan sosial, baik patologis maupun non-patologis, dan didukung oleh pemerintahan, lembaga, dan lembaga untuk mencapai perubahan yang menentukan. “Pelayanan sosial adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial disebut juga sebagai pelayanan kesejahteraan sosial”. (Muhidin 19920)

Dalam konteks ini, organisasi atau lembaga yang mengambil kendali untuk bisa memberikan pelayanan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Pelayanan yang diberikan seperti membantu untuk mengembangkan potensi agar dapat kembali kepada masyarakat dan memiliki keberfungsian sosialnya lagi. Menurut Khan mendefinisikan bahwa:

Pelayanan sosial dapat didefinisikan dalam konteks kelembagaan sebagai terdiri dari program-program yang disediakan berdasarkan kriteria yang berbeda dari kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar penyediaan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsiaan individu, untuk memudahkan akses umum ke pelayanan dan institusi, dan untuk membantalkan penggunaan fasilitas publik (Az-Zahra, 2018:82).

Dalam hal ini, pelayanan sosial diberikan sesuai kebutuhan agar masyarakat yang tidak mampu tetap mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya. Layanan-layanan seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, kaminan sosial, pelatihan kerja dan layanan sosial pribadi, bersama dengan pekerjaan sosial, idealnya membantu

orang-orang yang memiliki masalah sosial dan masyarakat miskin, termasuk memungkinkan mereka mengakses layanan yang mereka perlukan.

2.3.2 Fungsi pelayanan sosial

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi kehidupan yang diharapkan oleh masyarakat tidak dapat terwujud tanpa adanya upaya dari negara, organisasi dan dunia usaha. Dalam situasi seperti itu, layanan sosial diciptakan untuk melindungi mengubah atau mempromosikan kegiatan seperti pendidikan, pengasuhan anak, demonstrasi nilai-nilai dan membangun hubungan sosial. Menurut Richard M. Titmuus dalam Muhidin (1992:43) mengemukakan fungsi pelayanan sosial ditinjau dari prespektif masyarakat sebagai berikut:

1. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok dan masyarakat untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang.
2. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan untuk melindungi masyarakat.
3. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan sebagai program kompensasi bagi orang-orang yang tidak mendapat pelayanan sosial misalnya, kompensasi kecelekaan industry dan sebagainya.
4. Pelayanan-pelayanan atau keuntungan-keuntungan yang diciptakan sebagai suatu investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.

2.4 Tinjauan Konsep Dukungan sosial

2.4.1 Definisi Dukungan Sosial

Dukungan sosial merupakan pertukaran hubungan antara pribadi yang bersifat timbal balik dimana seseorang memberi bantuan kepada orang lain. Dukungan sosial sangat dibutuhkan oleh siapa saja dalam berhubungan dengan orang lain berlangsungnya hidup di tengah-tengah masyarakat karena manusia di ciptakan sebagai makhluk sosial. Istilah “dukungan sosial” secara umum digunakan untuk mengacu pada penerimaan rasa aman, peduli, penghargaan atau bantuan yang diterima seseorang dari orang lain atau kelompok. Dukungan sosial merujuk pada hubungan interpersonal yang melindungi individu terhadap konsekuensi negatif dari stress. Dukungan sosial yang diterima dapat membuat individu merasa tenang, diperhatikan, dicintai, timbul rasa percaya diri dan kompeten. (Kumalasari, 2012)

Sarason dalam Kumalasari (2012) mengatakan dukungan sosial adalah keberadaan, kesediaan, kepedulian dari orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai dan menyayangi. Sarason juga berpendapat bahwa dukungan sosial mencakup dua hal yaitu:

- a) Jumlah sumber dukungan sosial yang tersedia, merupakan persepsi individu terhadap sejumlah orang diandalkan saat individu membutuhkan bantuan (pendekatan berdasarkan kuantitas).

- b) Tingkatan kepuasan akan dukungan sosial yang diterima, berkaitan dengan persepsi individu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi (pendekatan berdasarkan kualitas).

Dukungan sosial (social support) adalah informasi dan umpan balik dari orang lain yang menunjukkan bahwa seseorang dicintai dan diperhatikan, dihargai, dihormati, dan dilibatkan dalam jaringan komunikasi dan kewajiban yang timbal balik (King, 2010:226). Rook dalam Smet (1994:134) mengatakan

Dukungan sosial merupakan salah satu fungsi dari ikatan sosial, dan ikatan-ikatan sosial tersebut menggambarkan tingkat kualitas umum dari hubungan interpersonal. Ikatan dan persahabatan dengan orang lain dianggap sebagai aspek yang memberikan kepuasan secara emosional dalam kehidupan individu. Saat seseorang didukung oleh lingkungan maka segalanya akan terasa lebih mudah.

Albrecht dan Adleman (1987), mendefinisikan “dukungan sosial sebagai komunikasi verbal dan non verbal antara penerima dan penyedia. Untuk mengurangi ketidak pastian tentang situasi, diri, orang lain, atau hubungan, dan berfungsi untuk mempertinggi suatu persepsi pada control diri seseorang dalam satu-satunya pengalaman hidup”. Dukungan sosial memiliki kaitannya dengan konsep resiliensi menurut Reisnick Gwyther, dan Roberto (2011) yang mengatakan bahwa “dukungan sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi resiliensi.”

Berdasarkan definisi di atas, ciri-ciri dukungan sosial meliputi komunikasi, mengurangi ketidakpastian, dan mempertinggi control. Dukungan sosial merupakan tipe komunikasi, bahwa bantuan individual merasa lebih pasti tentang sebuah situasi dan mempunyai kontrol yang lebih pasti tentang sebuah situasi dan

mempunyai kontrol lebih pasti tentang terhadap situasi dan mempunyai kontrol yang lebih terhadap situasi tersebut. Itu artinya, komunikasi yang suportif dapat mengurangi ketidakpastian Kendall dan Mattson (2011:182).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial merupakan bantuan atau dukungan yang positif yang diberikan oleh orang-orang tertentu sehingga individu yang menerima merasa diperhatikan, dihargai, dihormati, dicintai. Individu yang menerima dukungan sosial akan lebih percaya diri dan kompeten dalam menjalankan aktivitasnya.

2.4.2 Sumber-Sumber Dukungan Sosial

Sumber dukungan sosial banyak diperoleh individu dari lingkungan sekitarnya. Namun, ada yang harus diketahui beberapa banyak sumber dukungan sosial ini efektif bagi individu yang memerlukan. Sumber dukungan sosial merupakan aspek yang paling penting untuk diketahui dan dipahami oleh lingkungannya seperti dari pihak wali anak, teman di lingkungannya, dan orang-orang yang berada di tempat tinggalnya. Dengan dan pemahaman tersebut, seseorang akan tahu kepada siapa ia akan mendapatkan dukungan sosial sesuai dengan situasi dan keinginannya yang spesifik, sehingga dukungan sosial memiliki makna yang berarti bagi kedua belah pihak.

Dukungan sosial juga menurut Taylor (2009:555) menyatakan bahwa “dukungan sosial dapat bersumber dari pasangan atau partner, anggota keluarga, teman dekat, kontak sosial dan masyarakat, teman sekelompok, komunitas religi dan teman kerja saat di tempat kerja”. Sedangkan menurut Goldberger dan Breznitz

dalam Apollo (2012:261) mengemukakan bahwa “sumber dukungan sosial adalah orang tua, saudara kandung, anak-anak, kerabat, pasangan hidup, sahabat rekan sekerja, atau juga dari tetangga”. Sumber -sumber dukungan sosial dikelompokan oleh Gottlieb dalam Maslihah (2011:107) berdasarkan penelitian para ahli mengenai dukungan sosial, yaitu dukungan sosial dapat berasal dari :

- a. Hubungan profesional, yakni bersumber dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Seperti: konselor, psikiater, psikolog, dokter, pekerja sosial, maupun pengacara
- b. Hubungan non profesional, yakni dukungan sosial yang bersumber dari orang-orang terdekat. Seperti: teman, keluarga, dan lain-lain.

2.5 Tinjauan Konsep Resiliensi

2.5.1 Definisi Resiliensi

Kata ‘resiliensi’ atau resilience diambil dari Bahasa Latin ‘*resilire*’ yang berarti *to leap or spring back*; melompat atau memantul. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Thomas Tredgold pada tahun 1818 saat dia menggambarkan properti yang terbuat dari kayu, dan menjelaskan mengapa beberapa jenis kayu dapat menampung muatan yang beras secara tiba-tiba tanpa muncul kerusakan pada kayu tersebut (M.O. Wright & A.S. Masten, 2015;332). Istilah resiliensi secara umum digunakan sebagai gambaran atas kemampuan individu untuk bangkit setelah mengalami stress dan kesulitan. Resiliensi merupakan suatu usaha dari individu sehingga mampu beradaptasi dengan baik terhadap keadaan yang menekan, sehingga mampu untuk pulih dan berfungsi optimal dan mampu melalui

kesulitan, dan dapat mempertahankan kemampuan, untuk berfungsi secara kompeten dalam menghadapi berbagai stressor kehidupan. Menurut Grotberg (1999) dalam Hendriani (2022) mengungkapkan bahwa “Resiliensi merupakan kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi serta kapasitas manusia untuk menghadapi dan memecahkan masalah setelah mengalami kesengsaraan.”

Resiliensi akan dapat diketahui ketika individu berhadapan dengan hambatan atau kesulitan yang signifikan, dimana ia kemudian mampu menunjukkan adaptasi positif terhadap hambatan/kesulitan tersebut. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa resiliensi merupakan sebuah proses dinamis yang melibatkan peran berbagai faktor individual maupun sosial atau lingkungan yang mencerminkan kekuatan dan ketangguhan seseorang untuk bangkit dari pengalaman emosional negative saat menhadapi situasi sulit yang menekan atau mengandung hambatan yang signifikan.

Resiliensi dikemukakan oleh Reivich&Shatte (2002) “Resiliensi adalah kemampuan seseorang dalam mengatasi, melalui, dan kembali kepada kondisi semula setelah mengalami kejadian yang menekan”. Kemampuan ini sangat penting digunakan untuk mengelola stress dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang mampu mengembangkan kemampuan resiliensi dengan baik maka akan lebih sukses menghadapi permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi resiliensi.

2.5.2 Resiliensi Dalam Perspektif Psikologi

Resiliensi dalam khazanah ilmu psikologi, terutama dalam psikologi perkembangan, istilah resiliensi tergolong baru. Paradigma ini didasarkan pada pandangan kontemporer yang muncul dari lapangan psikiatri, psikologi, dan juga sosiologi tentang bagaimana anak, remaja, dan orang dewasa bangkit dari kondisi tertekan, stress, trauma, dan resiko dalam kehidupan mereka (Desmita, 2010:69).

Penelitian selama 20 tahun terakhir telah menunjukkan bahwa resiliensi adalah karakteristik multidimensi yang bervariasi dengan konteks, waktu, usia, jenis kelamin, dan asal budaya. Resiliensi mewujudkan kualitas pribadi yang memungkinkan untuk berkembang dalam menghadapi setiap kesulitan (Connor & Davidson, 2003:79). Resiliensi sangat penting bagi setiap individu, karena resiliensi adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk menghadapi, mengatasi, dan memperkuat, atau bahkan mengubah dirinya dari keadaan sulit (Grotberg, 1995:11). Tidak terkecuali, semua orang pasti mengalami kesulitan. Sehingga resiliensi diperlukan untuk menghindari stres dan perilaku negatif yang merugikan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya (Ruswahyuningsih & Tina, 2015:97).

Resiliensi adalah sebuah proses yang terjadi pada individu disaat individu tersebut menghadapi sebuah masalah atau kondisi yang menekan. Ada empat proses yang mungkin terjadi pada seseorang ketika mengalami kondisi menekan. Proses tersebut diungkapkan oleh Coulson dalam Arifani (2016:3):

a. Succumbing (Mengalah)

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kondisi dimana individu mengalah atau menyerah pasca menghadapi sebuah masalah atau ancaman dalam hidupnya. Outcomes (penampakan) dari individu yang berada pada kondisi ini berkemungkinan mengalami depresi dan pada kasus yang berat dapat menyebabkan individu melakukan bunuh diri.

b. Survival (Bertahan)

Pada fase ini, seorang individu dapat mengalami perasaan, perilaku, dan pikiran negatif berkepanjangan seperti menarik diri dan depresi karena gagalnya individu berfungsi secara wajar. Hal ini adalah efek dari fase survival, fase dimana individu tidak mampu meraih atau mengembalikan fungsi psikologis dan emosi positif setelah mengalami tekanan

c. Recovery (Pemulihan)

Pemulihan merupakan sebuah hasil atas usaha individu untuk bangkit dari tertekanan. Dalam fase ini, individu mampu memulihkan fungsi psikologi dan emosi secara wajar, serta mampu beradaptasi dengan kondisinya yang menekan. Meskipun tidak semua emosi dan perasaan negatif hilang atau pulih, namun individu tersebut dapat kembali beraktifitas dan mampu menunjukkan bahwa diri mereka resilien.

d. Thriving (Berkembang)

Jika pada saat fase recovery tidak semua fungsi dapat pulih secara maksimal, pada fase thriving individu mampu mendatangkan kemampuan baru yang membuat individu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal ini merupakan hasil dari pengalaman individu dalam menghadapi dan mengatasi kondisi yang menekan dan menentang. Kemampuan baru yang dimaksud seperti keinginan untuk melakukan interaksi yang positif, sense of purpose in life, kejelasan visi, dan lebih menghargai hidup yang mana meliputi perilaku, emosi, dan kognitif.

2.5.3 Aspek Resiliensi

Aspek resiliensi menurut Reivich dan Shatte (2002), memaparkan bahwa resiliensi pada individu tidak selalu berkenaan dengan keadaan yang berat dalam hidup, namun juga dibutuhkan individu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, ada tujuh kemampuan yang membentuk resiliensi, yaitu:

1. Regulasi Emosi (*Emotion regulation*)

Regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang dibawah kondisi yang menekan. Individu yang kurang mampu mengatur emosi akan mengalami kesulitan dalam membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain, jika kemampuan yang baik dalam meregulasi akan berkontribusi terhadap kemudahan dalam mengelola dan respons berinteraksi dengan orang lain maupun berbagai kondisi lingkungan.

2. Pengendalian Dorongan (*Impulse control*)

Pengendalian dorongan adalah kemampuan individu untuk mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan serta tekanan yang muncul dari dalam diri. Individu yang mempunyai kemampuan pengendalian dorongan rendah akan cepat mengalami perubahan emosi ketika berhadapan dengan berbagai stimulasi dari lingkungan yang membuat orang di sekitarnya merasa kurang nyaman sehingga berakibat pada buruknya hubungan sosial individu dengan orang lain. Kemampuan individu untuk mengendalikan implus sangat terkait dengan kemampuan regulasi emosi yang dimiliki.

3. Optimisme (*Optimism*)

Optimisme yang dimiliki seseorang individu menandakan bahwa ia percaya bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk mengatasi kemalangan yang mungkin terjadi dimasa depan. Optimisme akan menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk individu bila diiringi dengan efikasi diri. Optimisme yang dimaksud adalah optimisme yang realistis, yaitu sebuah kepercayaan akan terwujudnya masa depan yang lebih baik dengan diiringi segala usaha untuk mewujudkan hal tersebut.

4. Analisis Kausal (*Analisis causal*)

Kemampuan individu untuk mengidentifikasi secara akurat penyebab dari permasalahan yang sedang dihadapi. Individu yang tidak mampu mengidentifikasi permasalahan secara tepat, akan terus menerus berbuat kesalahan yang sama. Individu mampu mengidentifikasi segala yang menyebabkan kemalangan. Individu

yang resilien tidak akan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang telah dibuat demi menjaga harga diri atau membebaskan diri dari rasa bersalah. Individu akan berfokus dan memegang kendali penuh pada pemecahan masalah, sehingga perlahan ia akan mulai mengatasi permasalahan yang ada, mengarahkan energi yang dimiliki untuk bangkit dan meraih kesuksesan.

5. Empati

Empati sangat erat kaitannya dengan kemampuan individu untuk membaca tanda-tanda kondisi emosional dan psikologi orang lain. Individu mempunyai kemampuan yang cukup mahir dalam menginterpretasikan bahasa non-verbal yang di tunjukan oleh orang lain. Seseorang yang mempunyai kemampuan berempati cenderung mempunyai hubungan sosial yang positif.

6. Efikasi diri (*Self efficacy*)

Efikasi diri mempresentasikan sebuah keyakinan bahwa individu dapat memecahkan masalah yang dialami dan mencapai kesuksesan. Efikasi merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai resiliensi. Efikasi diri juga merupakan salah satu faktor kognitif yang menentukan sikap dan perilaku seseorang dalam sebuah permasalahan.

7. *Reaching out*

Resiliensi lebih dari sekedar bagaimana seorang individu memiliki kemampuan untuk mengatasi kemalangan dan bangkit dari keterpurukan, namun lebih dari itu resiliensi juga merupakan kemampuan individu meraih aspek positif dari kehidupan setelah kemalangan yang menimpa. Banyak individu yang tidak

mampu melakukan reaching out dikarenakan adanya kecenderungan sejak kecil untuk lebih banyak belajar menghindari dari kegagalan dan situasi yang memalukan dibandingkan berlatih untuk menghadapinya. Akibatnya individu banyak menunjukkan rasa takut dan jauh dari karakter resilien.

2.5.4 Sumber Resiliensi

Resiliensi tidak hanya ditemukan pada bagian kecil manusia saja bukan merupakan sesuatu yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk menjadi resilien dan setiap orang mampu untuk belajar bagaimana menghadapi rintangan dan hambatan dalam hidupnya. Grotberg (1999) dalam Hendriant (2022) menyebutkan terdapat tiga sumber resiliensi, ketiga sumber ini saling berinteraksi dan menentukan bagaimana resiliensi individu kemudian. Tiga sumber resiliensi yaitu:

1. *I Have*

I have adalah sumber resiliensi yang berhubungan dengan dukungan sosial yang diperoleh dari sekitar. Individu yang memiliki kepercayaan rendah terhadap lingkungannya cenderung memiliki sedikit jaringan sosial dan beranggapan bahwa lingkungan sosial hanya sedikit memberikan dukungan. Sebelum individu menyadari siapa dia dan apa yang bisa dilakukan, individu membutuhkan dukungan eksternal untuk membangun resiliensi. Dukungan ini diimplementasikan berupa hubungan yang baik dengan keluarga, lingkungan sekolah yang menyenangkan seperti guru dan teman-teman yang mencintai dan menerima dirinya, ataupun hubungan dengan orang lain selain keluarga dan lingkungan

sekolahnya. Melalui faktor ini, seseorang menjadi merasa memiliki hubungan yang penuh kepercayaan.

Grotberg (1995;8) menjelaskan lebih rinci tentang aspek-aspek yang ada pada *I have* ini, yaitu:

- 1) Mempunyai kepercayaan penuh dalam menjalani sebuah hubungan
- 2) Mempunyai struktur dan aturan yang diberlakukan dalam rumah.
- 3) Mempunyai orang-orang yang dijadikan panutan
- 4) Mempunyai dorongan untuk tidak menyusahkan orang lain
- 5) Mendapat layanan kesehatan, layanan Pendidikan, layanan keamanan, dan kesejahteraan individu.

2. *I am*

I am adalah sumber resiliensi yang berasal dalam diri individu. Sumber tersebut meliputi perasaan, sikap, dan keyakinan yang dimiliki oleh individu. Individu yang resilien merasa bahwa mereka adalah individu yang khas dan memiliki karakteristik yang menarik serta penyayang kepada sesama. Hal itu ditandai dengan usaha mereka untuk selalu mencintai orang lain, begitu juga sebaliknya. Selain itu, mereka juga sensitif dengan perasaan orang lain terhadapnya. Sikap kepedulian kepada sesama yang tinggi dan empati juga dimiliki oleh individu yang resilien. Perasaan itu mereka tunjukkan dengan perilaku yang menunjukkan sikap kepedulian atas peristiwa yang terjadi pada orang lain. Mereka merasakan ketidaknyamanan atas penderitaan yang menimpa orang lain, lalu berusaha

membantu mengatasi masalah yang terjadi. Individu yang resilien biasanya memiliki kepercayaan diri yang tinggi.

Menurut Grotberg (1995:9), I am dipengaruhi oleh beberapa kualitas pribadi yang individu, yaitu:

- 1) Mempunyai banyak orang yang menyayangi dan menyukainya.
- 2) Mencintai dan dapat turut merasakan apa yang orang lain rasakan serta peduli terhadap apa yang menimpa orang lain.
- 3) Mempunyai rasa bangga terhadap diri sendiri.
- 4) Bersedia bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya dan bersedia menerima konsekuensi dari perilakunya.
- 5) Percaya diri, dan memiliki keyakinan atas harapan-harapannya.

3. *I can*

I can adalah sumber resiliensi yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam memecahkan masalah menuju keberhasilan dengan kekuatan diri sendiri. *I can* berisi atas penilaian kemampuan diri yang mencakup kemampuan menyelesaikan persoalan dan keterampilan sosial. Hal-hal yang meliputi *I can* di antaranya adalah asertif (dapat mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan baik), dapat mengendalikan diri untuk tidak lari dari masalah, dan tidak melampiaskan keinginan mereka pada hal yang tidak baik.

Menurut Grotberg (1995:10), *I can* dipengaruhi oleh beberapa kualitas pribadi individu, yaitu:

- 1) Mampu berkomunikasi dengan baik
- 2) Mampu memecahkan masalah
- 3) Mampu mengendalikan perasaan-perasaan dan dorongan yang dimiliki oleh individu
- 4) Mampu mengukur emosi diri dan orang lain
- 5) Mampu membangun hubungan yang saling mempercayai dengan orang lain

2.6 Tinjauan Konsep Anak

2.6.1 Definisi Anak

Menurut *The Minimum Age Convention* nomor 138 (1973) pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia dibawah 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on the Rights of the Child* (1989), yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990, disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun. Dalam jurnal berjudul "Teori Perkembangan Kognitif dan Problematika pada Anak Usia Sekolah" Jean Piaget mengemukakan "Anak adalah individu yang aktif dan tumbuh berdasarkan dorongan-dorongan dirinya. Upaya anak untuk memahami dan bertindak terhadap dunianya disebut sebut perkembangan kognitif."

Batasan umur dapat dikatakan anak diungkapkan oleh Abu Huraerah (2018) dalam buku yang berjudul kekerasan terhadap anak

Jika dicermati, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Definisi anak dikemukakan juga oleh Bismar Siregar dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Hak-Hak Anak “Anak bukan lagi tergolong sebagai anak jika sudah melewati perhitungan batasan umur yang berlaku pada hukum tertulis negara. Apabila sudah melewati 18 tahun, maka seorang anak sudah menjadi dewasa.”

2.6.2 Hak-hak Anak

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-hak Anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak, baik individu, orangtua, organisasi sosial, pemerintah, maupun masyarakat, mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut (Huraerah 2018) :

- a. Prinsip 1 : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- b. Prinsip 2 : Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hokum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.

- c. Prinsip 3 : Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan
- d. Prinsip 4 : Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- e. Prinsip 5 : Setiap anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial, mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, Pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- f. Prinsip 6 : Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- g. Prinsip 7 : Setiap anak harus menerima Pendidikan secara Cuma-cumadan atas dasar wajib belajar.
- h. Prinsip 8 : Setiap anak dalam situasi apa pun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama
- i. Prinsip 9 : Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
- j. Prinsip 10 : Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Hak anak tertuang dalam konvensi anak-anak PBB pada tanggal 20 November 1989. Hak tersebut juga disahkan oleh negara Indonesia dalam Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 dan berisi yang mengemukakan bahwa anak memiliki 10 hak yang wajib dipenuhi oleh orangtua ataupun wali anak. Hak-hak tersebut yaitu:

1. Hak mendapatkan identitas

Manfaat identitas anak sendiri untuk melindungi pemenuhan hak anak, menjamin akses sarana umum, mencegah perdagangan anak, lalu menjadi bukti identitas diri ketika sewaktu-waktu anak mengalami peristiwa buruk.

2. Hak untuk mendapatkan pendidikan

Dalam kehidupan suatu negara pendidikan memegang peranan utama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.

3. Hak untuk bermain

Bermain adalah hak anak, ini kerap terlupakan karena dianggap tidak penting, padahal dari bermain orangtua akan melihat perkembangan anak. Bermain sebagai kegiatan yang menyenangkan menjadi cara palung utama bagi anak mempelajari berbagai hal. Selain menyenangkan, bermain memiliki manfaat untuk perkembangan anak, baik dalam aspek fisik maupun motorik.

4. Hak untuk mendapatkan perlindungan

Anak perlu perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas.

5. Hak untuk Rekreasi

Anak juga dapat merasakan stress, untuk itu anak sesekali harus mendapatkan hak nya untuk berrekreasi. Anak bisa diajak ke tempat hiburan favoritnya atau memberikan sesuatu sarana refreshing bagi anak. Anak yang bebas stress terbukti memiliki perkembangan yang optimal

6. Hak untuk mendapatkan makanan

Pemenuhan asupan gizi seimbang dibutuhkan anak agar usia tumbuh kembangnya optimal. Karena itu, orangtua perlu memperhatikan pola makan kepada anak agar tak hanya mengenyangkan, tapi juga bergizi

7. Hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan

Hak setiap anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga didukung dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Disebutkan bahwa, upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, bayi, balita, hingga remaja termasuk upaya pemeliharaan kesehatan anak cacatan dan anak yang memerlukan perlindungan.

8. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan

Anak juga berhak untuk diakui kewarganegaraannya oleh suatu bangsa secara resmi. Pengakuan ini tertuang dalam penerbitan dokumen kewarganegaraan, yang meliputi akta kelahiran dan kartu identitas. Dokumen inilah yang nantinya dapat menjamin anak untuk mendapatkan berbagai pendidikan dan pelayanan kesehatan dari negara.

9. Hak untuk berperan dalam pembangunan

Meskipun masih berusia dini, namun anak-anak juga berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Disinilah dibutuhkan peran dari orangtua untuk memperjuangkan pendidikan anak sehingga anak dapat menjadi generasi penerus bangsa.

10. Hak untuk mendapatkan kesamaan

Masih menurut deklarasi yang tertuang dalam konvensi PBB, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan kesamaan. Baik anak laki-laki, perempuan, suku bangsa manapun, agama apapun, kaya, miskin, serta berkebutuhan khusus berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua anak berhak mendapatkan hak-hak yang tertuang.

2.6.3 Kebutuhan Anak

Sebagaimana manusia lainnya, setiap anak memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Menurut Katz yang dikutip oleh Muhidin (2003:2-3) “Kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan orangtua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak, seperti: perhatian dan kasih sayang yang kontinyu, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orangtua”. Sedangkan Brown dan Swanson dalam Muhidin (2003:3) yang mengatakan bahwa kebutuhan umum anak adalah perlindungan (keamanan), kasih sayang, pendekatan/perhatian dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan mental yang

sehat. Sementara itu, Huttman dalam Muhidin (2003:3) merinci kebutuhan anak sebagai berikut:

1. Kasih sayang orangtua
2. Stabilitas emosional
3. Pengertian dan perhatian
4. Pertumbuhan kepribadian
5. Dorongan kreatif
6. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar
7. Pemeliharaan kesehatan
8. Pemenuhan kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai
9. Aktivitas rekreasi yang konstruktif dan positif
10. Pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan

2.7 Tinjauan Kekerasan Terhadap Anak

2.7.1 Definisi Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional atau psikis. Kekerasan terhadap anak menurut Andez (2006) :

Segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking/ jual-beli anak. Sedangkan Child Abuse adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.

Sedangkan Nadia (2004) memberikan pengertian kekerasan terhadap anak

Sebagai bentuk penganiayaan baik fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah tindakan-tindakan kasar yang mencelakakan anak, dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak. Alva menambahkan bahwa penganiayaan pada anak-anak banyak dilakukan oleh orangtua atau pengasuh yang seharusnya menjadi seorang pembimbing bagi anaknya untuk tumbuh dan berkembang.

Kekerasan di definisikan sebagai suatu serang atau invasi, baik fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt), atau tertutup (covert), baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. Elizabeth K dalam mengemukakan “Secara umum kekerasan adalah perilaku agresif dengan maksud untuk menimbulkan kerugian (fisik atau psikis). Kata maksud adalah inti kerusakan fisik atau psikologis yang terjadi secara tidak sengaja, tanpa disengaja, bukanlah kekerasan”.

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.

Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Sementara pengertian menurut Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 13 yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”.

Kekerasan Terhadap Anak merupakan perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan serta ancaman dan perampasan kemerdekaan dalam ruang lingkup rumah tangga. Kekerasan Terhadap Anak merupakan suatu batasan yang mengacu pada kekerasan yang terjadi pada lokus atau wilayah keluarga. Anak yang menjadi korban kekerasan tidak seharusnya mendapatkan perlakuan tidak baik seperti kekerasan, seperti yang ungkapkan oleh Huraerah (2011)

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang, agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

2.7.2 Faktor Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak senantiasa berulang terus terjadi sepanjang kehidupan manusia. Dari tahun angka kekerasan terhadap anak semakin lama

semakin meningkat. Kekerasan terhadap anak dipicu dari faktor kondisi keluarga yang mendukung hal positif atau negatif bagi anak, namun dengan permasalahan kekerasan terhadap anak, kondisi kedua orang tua yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak tidak dapat memberikan. Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian-kejadian seperti itulah yang memicu ketidakharmonisan diantara anggota keluarga. Tentunya tidak ada akibat jika tidak ada sebab yang melatarbelakangi. Begitu juga dengan tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga salah satunya kekerasan terhadap anak. Lingkup rumah tangga yang dipandang sebagai lingkungan yang seharusnya menjadi lingkungan yang damai dan memiliki kasih sayang, ternyata juga menyisakan kisah yang memilukan dan menimbulkan kepedihan, terdapat beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi seseorang melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak di kemukakan oleh Straus & Gelles (1988) yaitu:

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Anak dipukul dengan beberapa benda, dicambuk dan disakiti oleh orangtua dengan tujuan memberikan hukuman kepada anak terhadap perilaku salah anak. Kekerasan terhadap anak merupakan pemberian hukuman fisik dengan tujuan agar anak tidak nakal. Kekerasan terhadap anak mengacu pada tindakan meninju, menggigit, memukul, dan usaha menikam anak.

Kekerasan terhadap anak salah satunya dipengaruhi oleh emosional orang tua yang tidak bisa mengaturnya, karena anak memiliki sifat yang lumrah untuk melakukan segala yang diinginkannya, maka peran orang tua hanya untuk mengedukasi anak untuk memberi tahu hal yang benar dan hal yang tidak benar,

lalu memberi batasan-batasan yang seharusnya tidak anak lakukan. Kurang nya edukasi pada orang tua juga menjadi salah satu faktor terpenting dalam pola asuh anak di rumah.

2.7.3 Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Secara umum bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat dikategorisasikan kedalam empat bentuk, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak (Gelles, 1980).

a) Kekerasan Fisik

kekerasan fisik terhadap anak merupakan segala bentuk perlakuan yang menyebabkan luka atau cedera fisik pada anak. Kekerasan fisik diartikan sebagai sebuah tindakan kelalaian orangtua yang menimbulkan bahaya secara fisik, termasuk kematian pada anak (Diana, 1998). Kekerasan fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak.

b) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis atau emosional merupakan cedera mental akibat kekerasan psikologis atau verbal, meliputi penghardikan, mengancam, mengutuk atau menyumpah, melabel dengan kalimat negative atau merendahkan anak, memanggil dengan nama julukan, dan penyampaian kata-kata kotor yang menyebabkan masalah perilaku, kognitif, atau emosional yang serius pada anak. (Huraerah, 2012)

c) Penelantaran Anak

Penelantaran anak merupakan penundaan dalam mencari perawatan kesehatan anak, mengusir anak dari rumah, tidak peduli pada Pendidikan anak, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak (seperti tidak menyediakan makanan atau pengawasan yang memadai), kurang berkomunikasi dan tidak memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap tumbuh kembang anak. (Huraerah, 2021)

d) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada anak adalah suatu tindakan pelecehan pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa, keluarga dan orang terdekat anak. Tindakan tersebut dapat berupa sentuhan seksual yang tidak diinginkan anak, seperti mempermainkan alat kelamin anak dan melakukan kontak seksual lainnya secara paksaan. Menyebutkan kekerasan seksual meliputi gurauan porno, perbuatan yang menimbulkan rasa jijik. Lebih lanjut WHO (2002) mendefinisikan kekerasan seksual pada anak sebagai pelibatan anak dalam kegiatan seksual, pada saat anak sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan.